

EVALUASI PENGAWASAN KEARSIPAN, MENPAN DAN RB TEGASKAN AKAN ADA SANKSI BAGI LEMBAGA KEARSIPAN

Arsip Nasional Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2017. Acara Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Inna Bali (09/11). Acara Rakor bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing K/L, Pemerintah Daerah, PTN, BUMN/BUMD. Dalam laporannya, Kepala ANRI menyampaikan bahwa pada Tahun 2017 ini ANRI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 29 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 6 Perguruan Tinggi Negeri dan 4 Badan Usaha Milik Negara bidang Perbankan.

Selain itu melalui anggaran dekonsentrasi ANRI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 508 dari 514 Kabupaten/Kota. 6(enam) Kabupaten/kota yang tidak dilakukan pengawasan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DKI dan 1(satu) Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua karena masih ada beberapa kendala.

“Tentunya hal Ini merupakan bukti dan komitmen kami sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan. Dengan harapan agar agar bangsa ini mendapatkan potret penyelenggaraan kearsipan, yang tentunya akan terus



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2017 di Hotel Grand Inna Bali (09/11).

kita tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu”, ungkap Mustari Irawan.

Lebih lanjut Mustari menambahkan bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan ANRI dibantu oleh Provinsi diperoleh data bahwa 1 LPNK saja atau 3,45 %, yang memperoleh penilaian “Sangat Baik”, dengan range nilai antara 91 s.d 100. Kemudian 2 LPNK atau 6,9 %, yang memperoleh penilaian “Baik”, dengan range nilai antara 76 s.d 90. Sementara 10 LPNK atau 34,48% memperoleh penilaian “Cukup” dengan range nilai dari 61 s.d 75, 4 LPNK atau 13,79% memperoleh penilaian “Kurang” dengan range nilai dari 51 s.d 60, 12 LPNK atau 41,38%

memperoleh penilaian “buruk” dengan range nilai 0 s.d 50.

Sementara itu untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hasilnya yakni, 0% (nol persen) yang memperoleh predikat “Sangat Baik”. Sedangkan 1 % yang memperoleh predikat “baik”, 2% (dua persen) memperoleh predikat “Cukup”. Kemudian 4% (empat persen) memperoleh predikat “Kurang”. Sedangkan sebagian besar sebanyak 93% (sembilan puluh tiga persen) masih dalam kondisi “buruk”.

“Kondisi tersebut menegaskan bahwa bidang kearsipan masih menghadapi berbagai tantangan

DAERAH

dan kendala, sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita bersama agar penyelenggaraan kearsipan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu”, terangnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya menyampaikan agar ANRI terus berupaya untuk bekerja lebih ekstra lagi untuk mewujudkan tertib arsip.

“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik dan memang kita perlukan. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional agar mengerahkan segala upaya dalam melakukan pengawasan kearsipan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah”, ungkapnya.

Asman Abnur menambahkan bahwa ANRI harus memastikan bahwa kebijakan kearsipan selalu mutakhir, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, ANRI juga harus memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat secara mandiri melakukan pengelolaan arsipnya. Setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis yang kompeten serta sarana dan prasarana kearsipan yang baik, terutama sarana penyimpanan arsip.

“Sekali lagi saya tekankan, penanganan arsip secara komprehensif dan terpadu akan mendukung kinerja organisasi secara optimal. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kearsipan tersebut diperlukan baik perubahan *mindset* dan *culture-set* birokrasi, masyarakat, dan pengguna arsip di bidang kearsipan bahwa peran arsip memiliki porsi penting, karena sistem penyelenggaraan kearsipan yang baik akan mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan”, tuturnya.



Kepala ANRI Mustari Irawan

Asman Abnur menegaskan, kedepan akan ada sanksi bagi lembaga kearsipan ataupun instansi pemerintah yang memiliki kinerja buruk di bidang kearsipan akan berdampak pada tunjangan kinerja dan pengadaan formasi pegawai. “Bagi yang hasil evaluasi kearsipannya tidak baik, saya akan memberi sanksi tidak akan menambah formasi Pegawai Negerinya dulu, habis itu saya runding lagi sama Bu Menteri Keuangan, kalau perlu daerah atau lembaga atau kementerian, Provinsi, baik itu kabupaten/kota khususnya daerah, kalau pengelolaan arsipnya tidak benar, jangan ditambah tunjangan daerahnya”, tegas Asman Abnur.

Pengawasan kearsipan adalah proses dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI melalui tahapan-tahapan kegiatan: perencanaan program pengawasan kearsipan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan kearsipan dan monitoring hasil pengawasan kearsipan. Adapun aspek-aspek pengawasan kearsipan

di pemerintahan daerah meliputi aspek kebijakan, program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana-prasarana kearsipan.

Kepala Pusat Akreditasi ANRI Rudi Anton menyampaikan pentingnya strategi pengawasan kearsipan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pengawasan kearsipan. “pengawasan kearsipan harus ada strateginya, jadi kalau kita bicara strategi pengawasan, harus dimulai dengan audit supaya kita punya peta kondisi penyelenggaraan kearsipan negara kita ini seperti apa”, ujar Rudi Anton. Rudi menambahkan, dengan adanya audit, dapat memberi ruang bagi objek pengawasan untuk melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi audit.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan



Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton

bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamanatkan bahwa :1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Koordinasi ANRI dengan Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal pengawasan kearsipan merupakan strategi yang efektif dan efisien, mengingat banyaknya objek

pengawasan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Akreditasi Rudi Anton dalam acara sarasehan wartawan yang mengangkat tema Pengawasan Kearsipan (22/11) menyampaikan bahwa Tim Pengawas Kearsipan ANRI di lapangan memperoleh banyak temuan dan permasalahan-permasalahan terkait dengan belum tertibnya budaya pengarsipan. "banyak lembaga yang belum menyusun empat pilar pengelolaan arsip dinamis (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip)", terang Kepala Pusat Akreditasi Rudi Anton. Permasalahan lain yang muncul antara lain seringnya mutasi di lembaga kearsipan daerah yang akan diandalkan sebagai pembina maupun pengawas sangat tinggi, sehingga SDM yang baru menggeluti dunia kearsipan berjalan kurang optimal. Gambaran permasalahan yang umumnya terdapat di tingkat pemerintahan daerah antara lain aspek kebijakan, program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana-prasarana kearsipan.

Dari sisi kebijakan, masih banyak pencipta arsip baik pusat maupun daerah yang belum mengacu pada Peraturan Kepala ANRI dalam menetapkan kebijakan kearsipan antara lain Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Program Arsip Vital. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kebijakan pada pencipta arsip ditetapkan sebelum UU, PP dan Perka lahir. Alasan lain yang sering disampaikan adalah tidak ada arsiparis pada pencipta arsip tersebut sehingga tidak dapat menyusun kebijakan, atau yang lebih miris adalah belum tahu kalau ada pengaturan mengenai hal tersebut. Untuk alasan yang terakhir sering dijumpai ketika tim pengawas menanyakan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Selain itu hal mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa terdapat dualisme pengaturan naskah dinas antara ANRI dan Kementerian Dalam Negeri untuk pencipta arsip tingkat pemerintahan daerah. Pengaturan tentang pedoman penyusunan tata naskah dinas tingkat pemerintahan daerah diatur dalam 2 (dua) produk hukum yaitu:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah

2) Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Seharusnya dengan lahirnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 sebagai amanah langsung dari Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa tata



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan berfoto bersama dengan para perwakilan penerima Laporan Audit Kearsipan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota

naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah menjadi batal demi hukum. Namun dalam kenyataannya masih banyak pencipta arsip di tingkat daerah yang masih mengacu pada produk hukum tersebut. Untuk itu dengan pengawasan kearsipan, ANRI mendorong agar pencipta arsip dapat mengacu pada produk hukum yang ditetapkan oleh ANRI dalam kebijakan kearsipan.

Dalam konteks program kearsipan, masih banyak dijumpai pencipta arsip yang kurang bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kearsipan. Ada beberapa lembaga kearsipan daerah yang

proporsi alokasi anggaran kearsipan sangat kecil dibanding dengan alokasi untuk anggaran perpustakaan. Dengan demikian program-program kearsipan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Aspek yang menjadi permasalahan tata kelola arsip administrasi pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah yakni aspek pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di pada level pemerintahan daerah, belum semuanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan arsip yang tidak mengalir dari unit pengolah ke unit kearsipan secara berkesinambungan, penumpukan arsip di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemusnahan arsip yang masih belum sesuai dengan ketentuan, kesadaran untuk menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan daerah adalah beberapa contoh buruk kondisi pengelolaan arsip.

Permasalahan berikutnya di bidang kelembagaan. Pengorganisasian kearsipan pada pencipta arsip khususnya unit kearsipan, masih banyak yang belum diatur secara khusus dalam kebijakan. Baru beberapa pemerintahan daerah yang sudah mengatur pengorganisasi kearsipan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan arsip yang menyebutkan secara eksplisit fungsi, tugas dan tanggungjawab unit kearsipan dan unit pengolah. Pemerintahan Daerah yang tidak secara jelas mengatur pengorganisasian kearsipan banyak yang tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan pembinaan kearsipan ke unit pengolah maupun ke unit kearsipan jenjang berikutnya, karena tidak ada payung hukumnya. Termasuk juga eselonering yang menangani urusan kearsipan, kebanyakan masih berada pada level rendah, bahkan masih terdapat hanya merupakan fungsi yang melekat pada sub bagian tata usaha.

Persolaannya yang tidak kalah penting yakni masalah SDM. Masalah SDM menjadi penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam mengelola kearsipan di lingkungan masing-masing. Namun masih terdapat pemerintahan daerah yang belum memiliki arsiparis. Dengan ketiadaan arsiparis, pemerintah daerah mengandalkan kepada pengelola arsip yang tentu saja beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Arsiparis tidak dapat mereka kerjakan. Bahkan masih terdapat suatu pemerintahan daerah yang mengandalkan "ingatan" dari pengelola arsip untuk menemukan arsip yang dicari. Tentu saja hal tersebut jauh dari teori maupun praktek kearsipan di belahan dunia manapun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan arsip dilaksanakan oleh Arsiparis, namun untuk menambah kuantitas arsiparis juga bukan hal yang mudah karena ada masalah moratorium. Salah satu solusi adalah dengan impassing atau pindah jabatan baik dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu lainnya atau dari jabatan fungsional umum.

Aspek berikutnya yang menjadi kendala dalam tertib arsip administrasi pemerintah daerah adalah prasarana dan sarana kearsipan. Kondisi prasarana dan sarana kearsipan juga belum semuanya dalam kondisi yang memenuhi standar. Masih terdapat gedung record center yang berlokasi di daerah yang rawan banjir, peralatan pencegahan bahaya kebakaran yang tidak memadai, serta ruangan dan peralatan perlengkapan record center yang belum memadai seperti rak arsip, boks arsip maupun alat pengatur suhu dan kelembaban.

Bagi organisasi arsip merupakan informasi yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan

aktivitas operasional serta menjadi bentuk akuntabilitas kinerja serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Sedangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, arsip merupakan suatu rekaman perjalanan kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, pentingnya akan pemahaman mengenai arsip perlu terus digaungkan ke public agar arsip dapat terjaga dan lestari dengan baik.

Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi. Menumpuknya arsip yang tidak ada gunanya serta sistem tata arsip yang tidak menentu akan mengakibatkan ruangan terasa sempit dan tidak nyaman sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Apabila suatu arsip sulit untuk ditemukan akan menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan akan mempersulit proses hukum dan pertanggungjawaban.

Masalah kearsipan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang lebih di kalangan publik. Masih banyak yang belum memahami arti penting dan manfaat arsip dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi maupun bagi organisasi. Arsip relatif masih sangat rendah dan dianggap sebelah mata.

Setiap kegiatan organisasi, khususnya organisasi pemerintah daerah tidak terlepas dari lingkup administrasi karena hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi pemerintah daerah tanpa kegiatan administrasi maka tidak akan dapat tercapai visi dan misinya dengan efektif.

Pada penyelenggaraan kearsipan

tingkat pemerintah daerah kondisinya masih memprihatinkan. Berdasarkan Hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2016 diperoleh dua pemerintahan daerah yang memperoleh penilaian "Baik", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Cukup", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Kurang". Sedangkan sembilan belas pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Buruk". Hasil audit kearsipan pada pemerintahan daerah dengan kategori BAIK: 1) Jawa Timur, 2) Jawa Tengah. Kategori CUKUP: 3) DI Yogyakarta 4) Jawa Barat, 5) DKI Jakarta, 6) Kalimantan Timur, 7) Sulawesi Selatan, 8) Bali, 9) Kalimantan Barat. Kategori KURANG: 10) Aceh, 11) Sumatera Barat, 12) Banten, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Jambi. Kategori BURUK: 15) Riau, 16) Sulawesi Tengah, 17) Sumatera Selatan, 18) Kalimantan Selatan, 19) Bangka Belitung, 20) Papua, 21) Kalimantan Tengah, 22) Lampung, 23) Sumatera Utara, 24) Sulawesi Utara, 25) Bengkulu, 26) Nusa Tenggara Timur, 27) Sulawesi Tenggara, 28) Maluku, 29) Kepulauan Riau, 30) Sulawesi Barat, 31) Gorontalo, 32) Maluku Utara, 33) Papua Barat.

Dengan adanya kebijakan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga akan terwujud tertib arsip administrasi pemerintahan di tingkat daerah. (Is)

(Informasi mengenai hasil pengawasan kearsipan pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017 dapat diunduh di website www.anri.go.id - Publikasi - Majalah ARSIP Edisi 73)

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
PERINGKAT NILAI DAN KATEGORI
BERDASARKAN NAMA KABUPATEN KOTA**

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
1	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	89,71	BAIK
2	JAWA TIMUR	Kabupaten Probolinggo	80,38	BAIK
3	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Utara	80,14	BAIK
4	BANTEN	Kabupaten Tangerang	79,19	BAIK
5	JAWA TIMUR	Kabupaten Malang	78,95	BAIK
6	JAWA TENGAH	Kabupaten Purworejo	78,71	BAIK
7	JAWA TIMUR	Kabupaten Tuban	77,75	BAIK
8	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	76,56	BAIK
9	JAWA BARAT	Kabupaten Bogor	74,64	CUKUP
10	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Sleman	73,33	CUKUP
11	JAWA TENGAH	Kabupaten Magelang	71,05	CUKUP
12	DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	70,24	CUKUP
13	BALI	Kabupaten Badung	67,94	CUKUP
14	JAWA TIMUR	Kabupaten Lumajang	67,70	CUKUP
15	JAWA TIMUR	Kabupaten Tulungagung	67,70	CUKUP
16	JAWA TIMUR	Kota Madiun	67,22	CUKUP
17	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	66,99	CUKUP
18	SUMATERA UTARA	Kota Medan	66,51	CUKUP
19	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	66,51	CUKUP
20	JAWA TIMUR	Kota Blitar	66,31	CUKUP
21	JAWA BARAT	Kota Bekasi	65,31	CUKUP
22	JAWA TIMUR	Kabupaten Nganjuk	65,07	CUKUP
23	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu Timur	64,83	CUKUP
24	JAWA TIMUR	Kabupaten Magetan	64,59	CUKUP
25	JAWA TENGAH	Kabupaten Sragen	64,35	CUKUP
26	JAWA TENGAH	Kota Magelang	64,35	CUKUP
27	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Banyuasin	63,16	CUKUP
28	JAWA BARAT	Kabupaten Sukabumi	62,68	CUKUP
29	JAWA TENGAH	Kabupaten Jepara	61,96	CUKUP
30	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu	61,72	CUKUP
31	JAWA TIMUR	Kabupaten Banyuwangi	61,72	CUKUP
32	BANTEN	Kota Cilegon	61,48	CUKUP
33	JAWA BARAT	Kabupaten Bekasi	60,77	KURANG
34	JAWA TIMUR	Kota Batu	60,77	KURANG
35	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	60,77	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
36	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Sumbawa	60,29	CUKUP
37	JAWA TIMUR	Kabupaten Blitar	60,29	KURANG
38	JAWA TIMUR	Kabupaten Gresik	60,05	KURANG
39	JAWA TENGAH	Kabupaten Cilacap	60,00	KURANG
40	JAWA BARAT	Kota Cirebon	59,81	KURANG
41	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	59,81	KURANG
42	KEP. BANGKA BELITUNG	Kota Pangkalpinang	59,57	KURANG
43	JAWA BARAT	Kabupaten Bandung	59,57	KURANG
44	JAWA TENGAH	Kabupaten Banjarnegara	59,33	KURANG
45	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Barat	59,09	KURANG
46	BALI	Kota Denpasar	58,13	KURANG
47	JAWA BARAT	Kabupaten Karawang	57,89	KURANG
48	JAWA TENGAH	Kabupaten Kendal	57,89	KURANG
49	SUMATERA SELATAN	Kota Lubuklinggau	57,42	KURANG
50	JAWA TENGAH	Kabupaten Pati	57,00	KURANG
51	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Mempawah	56,46	BURUK
52	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kubu Raya	56,46	BURUK
53	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sanggau	55,50	KURANG
54	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	55,50	KURANG
55	JAWA TIMUR	Kabupaten Sidoarjo	55,26	KURANG
56	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Bantul	55,24	KURANG
57	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Timur Tengah Selatan	55,13	KURANG
58	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	55,02	KURANG
59	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	54,55	KURANG
60	JAWA BARAT	Kabupaten Indramayu	53,83	KURANG
61	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Banjar	53,83	KURANG
62	SUMATERA SELATAN	Kota Pagar Alam	53,35	KURANG
63	JAWA TIMUR	Kabupaten Pasuruan	53,35	KURANG
64	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Sumbawa Barat	53,11	BURUK
65	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	53,00	KURANG
66	JAWA TENGAH	Kabupaten Temanggung	53,00	KURANG
67	JAWA BARAT	Kabupaten Purwakarta	52,87	KURANG
68	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Tengah	52,63	KURANG
69	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Gunungkidul	52,62	KURANG
70	SUMATERA BARAT	Kabupaten Sijunjung	52,53	BURUK
71	JAWA TENGAH	Kabupaten Wonosobo	52,39	KURANG
72	BENGKULU	Kabupaten Lebong	52,35	KURANG
73	BANTEN	Kota Tangerang	52,15	KURANG
74	JAWA TENGAH	Kabupaten Banyumas	52,15	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
75	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Barru	52,15	KURANG
76	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Bintan	52,00	KURANG
77	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Parigi Moutong	52,00	KURANG
78	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	51,91	KURANG
79	JAWA TIMUR	Kabupaten Ponorogo	51,91	KURANG
80	JAWA BARAT	Kabupaten Garut	51,61	KURANG
81	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Banyuasin	51,44	KURANG
82	JAWA TIMUR	Kabupaten Jember	51,44	KURANG
83	JAWA TIMUR	Kota Kediri	51,20	KURANG
84	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Kulon Progo	51,19	KURANG
85	JAWA TENGAH	Kabupaten Grobogan	51,00	BURUK
86	JAWA TIMUR	Kabupaten Bojonegoro	50,96	BURUK
87	JAWA TIMUR	Kabupaten Pacitan	50,72	BURUK
88	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	50,48	BURUK
89	JAWA TIMUR	Kabupaten Lamongan	50,24	BURUK
90	BANTEN	Kabupaten Lebak	50,00	BURUK
91	JAWA TENGAH	Kabupaten Pekalongan	50,00	BURUK
92	JAWA TIMUR	Kabupaten Ngawi	50,00	BURUK
93	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sintang	49,76	BURUK
94	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tabalong	49,52	BURUK
95	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Barat	49,04	BURUK
96	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Selatan	49,04	BURUK
97	JAWA TENGAH	Kabupaten Karanganyar	49,00	BURUK
98	JAWA TENGAH	Kabupaten Kebumen	49,00	BURUK
99	JAWA TENGAH	Kabupaten Demak	49,00	BURUK
100	JAWA TENGAH	Kabupaten Kudus	49,00	BURUK
101	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Saburajua	48,93	BURUK
102	JAWA BARAT	Kabupaten Majalengka	48,33	BURUK
103	JAWA BARAT	Kota Bogor	48,33	BURUK
104	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Berau	48,09	BURUK
105	JAWA TENGAH	Kabupaten Rembang	48,00	BURUK
106	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	48,00	BURUK
107	JAWA BARAT	Kota Bandung	47,85	BURUK
108	JAWA BARAT	Kabupaten Cirebon	47,37	BURUK
109	JAWA TIMUR	Kota Malang	47,37	BURUK
110	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	47,13	BURUK
111	JAWA TENGAH	Kabupaten Wonogiri	47,00	BURUK
112	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Batola	46,65	BURUK
113	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Timur	46,65	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
114	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Timur	46,41	BURUK
115	RIAU	Kabupaten Siak	46,21	BURUK
116	JAWA TENGAH	Kabupaten Purbalingga	46,00	BURUK
117	LAMPUNG	Kota Metro	45,45	BURUK
118	SUMATERA BARAT	Kabupaten Tanah Datar	45,22	BURUK
119	SUMATERA BARAT	Kota Padang	45,22	BURUK
120	JAWA TENGAH	Kabupaten Sukoharjo	45,00	BURUK
121	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Belitung Timur	44,98	BURUK
122	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	44,95	BURUK
123	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Donggala	44,00	BURUK
124	JAWA BARAT	Kabupaten Cianjur	43,54	BURUK
125	JAWA BARAT	Kota Depok	43,54	BURUK
126	JAWA TIMUR	Kabupaten Sumenep	43,30	BURUK
127	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Balangan	43,30	BURUK
128	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Belitung	43,06	BURUK
129	SUMATERA UTARA	Kabupaten Deli Serdang	43,06	BURUK
130	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pasaman	42,82	BURUK
131	JAWA TIMUR	Kabupaten Kediri	42,82	BURUK
132	JAWA TIMUR	Kabupaten Mojokerto	42,58	BURUK
133	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Timur Tengah Utara	42,00	BURUK
134	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai Barat	41,77	BURUK
135	JAWA TIMUR	Kabupaten Jombang	41,63	BURUK
136	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Timur	41,39	BURUK
137	BALI	Kabupaten Buleleng	41,39	BURUK
138	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	41,39	BURUK
139	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kayong Utara	41,15	BURUK
140	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Pinrang	41,15	BURUK
141	JAWA BARAT	Kabupaten Sumedang	40,91	BURUK
142	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	40,67	BURUK
143	SUMATERA BARAT	Kabupaten Dharmasraya	40,67	BURUK
144	JAWA TIMUR	Kabupaten Sampang	40,67	BURUK
145	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tanah Laut	40,67	BURUK
146	JAWA BARAT	Kabupaten Ciamis	40,43	BURUK
147	JAWA TIMUR	Kabupaten Pamekasan	40,43	BURUK
148	JAWA TIMUR	Kabupaten Situbondo	40,43	BURUK
149	RIAU	Kabupaten Kampar	40,24	BURUK
150	JAWA TENGAH	Kabupaten Semarang	40,00	BURUK
151	JAWA TENGAH	Kabupaten Boyolali	40,00	BURUK
152	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	39,95	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
153	SUMATERA BARAT	Kota Solok	39,95	BURUK
154	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka	39,95	BURUK
155	RIAU	Kabupaten Indragiri Hulu	39,57	BURUK
156	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Utara	39,47	BURUK
157	JAMBI	Kabupaten Muaro Jambi	39,29	BURUK
158	JAMBI	Kota Jambi	39,29	BURUK
159	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Kota Baru	39,23	BURUK
160	SUMATERA BARAT	Kota Bukittinggi	39,23	BURUK
161	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	39,00	BURUK
162	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Landak	39,00	BURUK
163	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	39,00	BURUK
164	JAWA TENGAH	Kota Semarang	39,00	BURUK
165	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bone	38,66	BURUK
166	BANTEN	Kota Tangerang Selatan	38,52	BURUK
167	JAWA TIMUR	Kabupaten Bondowoso	38,52	BURUK
168	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	38,52	BURUK
169	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu Utara	38,28	BURUK
170	JAWA TENGAH	Kabupaten Blora	38,28	BURUK
171	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	38,19	BURUK
172	JAWA TENGAH	Kabupaten Pemasang	38,00	KURANG
173	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Kupang	37,92	BURUK
174	JAWA BARAT	Kabupaten Bandung Barat	37,80	BURUK
175	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sambas	37,80	BURUK
176	SUMATERA BARAT	Kabupaten Solok	37,56	BURUK
177	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	37,23	BURUK
178	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	37,00	BURUK
179	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Sinjai	36,99	BURUK
180	SUMATERA BARAT	Kabupaten Lima Puluh Kota	36,93	BURUK
181	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pasaman Barat	36,84	BURUK
182	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kotawaringin Barat	36,48	BURUK
183	RIAU	Kota Dumai	36,19	BURUK
184	JAMBI	Kabupaten Merangin	36,19	BURUK
185	JAWA BARAT	Kabupaten Subang	36,12	BURUK
186	JAWA TIMUR	Kabupaten Madiun	35,89	BURUK
187	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	35,65	BURUK
188	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Selatan	35,65	BURUK
189	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bulukumba	35,56	BURUK
190	JAWA TENGAH	Kabupaten Brebes	35,41	BURUK
191	SUMATERA BARAT	Kota Sawah Lunto	35,17	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
192	JAWA BARAT	Kabupaten Kuningan	35,17	BURUK
193	MALUKU UTARA	Kota Ternate	35,17	BURUK
194	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Kertanegara	34,86	BURUK
195	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Muara Enim	34,69	BURUK
196	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tanah Bumbu	34,69	BURUK
197	JAWA TENGAH	Kota Tegal	34,45	BURUK
198	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Bengkayang	34,45	BURUK
199	RIAU	Kabupaten Pelalawan	34,23	BURUK
200	JAWA TIMUR	Kabupaten Trenggalek	34,21	BURUK
201	SUMATERA BARAT	Kabupaten Agam	33,73	BURUK
202	JAWA BARAT	Kota Cimahi	33,73	BURUK
203	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka Utara	33,65	BURUK
204	SUMATERA BARAT	Kabupaten Padang Pariaman	33,49	BURUK
205	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tapin	33,49	BURUK
206	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Selatan	33,37	BURUK
207	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Soppeng	33,33	BURUK
208	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Malinau	33,25	BURUK
209	JAWA TENGAH	Kabupaten Batang	33,01	BURUK
210	BALI	Kabupaten Bangli	33,00	BURUK
211	ACEH	Kabupaten Gayo Lues	32,54	BURUK
212	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	32,30	BURUK
213	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Dompu	32,30	BURUK
214	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Tengah	32,06	BURUK
215	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Ketapang	32,06	BURUK
216	ACEH	Kota Subulussalam	32,00	BURUK
217	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Belu	31,98	BURUK
218	SUMATERA BARAT	Kabupaten Kepulauan Mentawai	31,82	BURUK
219	JAWA TIMUR	Kabupaten Bangkalan	31,82	BURUK
220	RIAU	Kabupaten Bengkalis	31,67	BURUK
221	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Enrekang	31,10	BURUK
222	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Alor	31,03	BURUK
223	JAWA TENGAH	Kabupaten Klaten	31,00	BURUK
224	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Tojo Una-Una	31,00	BURUK
225	RIAU	Kabupaten Rokan Hulu	30,88	BURUK
226	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Lahat	30,86	BURUK
227	JAWA BARAT	Kabupaten Tasikmalaya	30,86	BURUK
228	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	30,86	BURUK
229	SUMATERA UTARA	Kabupaten Dairi	30,86	BURUK
230	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Timur	30,70	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
231	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Ende	30,55	BURUK
232	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Paser	30,22	BURUK
233	BANTEN	Kota Serang	30,14	BURUK
234	SUMATERA UTARA	Kabupaten Karo	30,14	BURUK
235	JAWA BARAT	Kota Banjar	29,90	BURUK
236	SULAWESI SELATAN	Kota Palopo	29,90	BURUK
237	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Kepulauan	29,26	BURUK
238	BENGKULU	Kabupaten Rejang Lebong	29,12	BURUK
239	JAMBI	Kabupaten Bungo	28,98	BURUK
240	JAMBI	Kabupaten Sarolangun	28,98	BURUK
241	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	28,95	BURUK
242	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	28,95	BURUK
243	JAMBI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28,81	BURUK
244	SUMATERA SELATAN	Kota Prabumulih	28,75	BURUK
245	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangka Raya	28,59	BURUK
246	RIAU	Kota Pekanbaru	28,57	BURUK
247	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Sidenreng Rappang	28,23	BURUK
248	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Utara	28,10	BURUK
249	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Lingga	28,00	BURUK
250	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	27,99	BURUK
251	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	27,99	BURUK
252	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Ngada	27,92	BURUK
253	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Penajam Paser Utara	27,45	BURUK
254	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Nagekeo	27,45	BURUK
255	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sekadau	27,27	BURUK
256	JAWA TENGAH	Kabupaten Tegal	27,00	BURUK
257	BALI	Kabupaten Gianyar	27,00	BURUK
258	BALI	Kabupaten Karangasem	27,00	BURUK
259	BENGKULU	Kota Bengkulu	26,97	BURUK
260	JAMBI	Kabupaten Kerinci	26,90	BURUK
261	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Rawas	26,79	BURUK
262	SUMATERA UTARA	Kabupaten Asahan	26,56	BURUK
263	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Wajo	26,25	BURUK
264	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Sukamara	26,20	BURUK
265	SUMATERA UTARA	Kota Tanjungbalai	26,07	BURUK
266	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Malaka	26,01	BURUK
267	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Melawi	25,84	BURUK
268	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Nunukan	25,84	BURUK
269	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Barat	25,78	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
270	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Timur	25,78	BURUK
271	BANTEN	Kabupaten Serang	25,60	BURUK
272	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	25,60	BURUK
273	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Pulang Pisau	25,48	BURUK
274	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Barat	25,42	BURUK
275	LAMPUNG	Kabupaten Tanggamus	25,36	BURUK
276	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Timur	25,36	BURUK
277	SUMATERA UTARA	Kabupaten Simalungun	25,36	BURUK
278	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu	25,24	BURUK
279	SUMATERA UTARA	Kabupaten Padang Lawas	24,76	BURUK
280	JAMBI	Kabupaten Batang Hari	24,76	BURUK
281	LAMPUNG	Kabupaten Pesawaran	24,40	BURUK
282	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Maros	24,34	BURUK
283	ACEH	Kabupaten Aceh Besar	24,00	BURUK
284	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Flores Timur	23,75	BURUK
285	SUMATERA UTARA	Kabupaten Batubara	23,68	BURUK
286	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Barat	23,68	BURUK
287	SULAWESI BARAT	Kabupaten Majene	23,63	BURUK
288	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	23,63	BURUK
289	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Rote Ndao	23,39	BURUK
290	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka	23,39	BURUK
291	RIAU	Kabupaten Meranti	23,33	BURUK
292	SUMATERA UTARA	Kabupaten Mandailing Natal	23,33	BURUK
293	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Murung Raya	23,26	BURUK
294	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu Utara	23,09	BURUK
295	ACEH	Kabupaten Nagan Raya	23,00	BURUK
296	ACEH	Kabupaten Aceh Tengah	23,00	BURUK
297	ACEH	Kabupaten Aceh Timur	23,00	BURUK
298	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Ilir	22,73	BURUK
299	MALUKU	Kabupaten Buru	22,73	BURUK
300	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ilir	22,49	BURUK
301	BENGKULU	Kabupaten Kaur	22,20	BURUK
302	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Utara	22,13	BURUK
303	SUMATERA BARAT	Kabupaten Solok Selatan	22,01	BURUK
304	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Utara	22,01	BURUK
305	SULAWESI UTARA	Kota Tomohon	22,01	BURUK
306	KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	22,00	BURUK
307	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Natuna	22,00	BURUK
308	JAMBI	Kota Sungai Penuh	21,90	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
309	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Selatan	21,77	BURUK
310	LAMPUNG	Kabupaten Tulang Bawang Barat	21,77	BURUK
311	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Takalar	21,77	BURUK
312	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kotawaringin Timur	21,65	BURUK
313	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)	21,29	BURUK
314	LAMPUNG	Kabupaten Way Kanan	21,29	BURUK
315	SUMATERA UTARA	Kabupaten Serdang Bedagai	21,29	BURUK
316	JAMBI	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	21,15	BURUK
317	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Selatan	21,05	BURUK
318	LAMPUNG	Kabupaten Pringsewu	20,81	BURUK
319	BALI	Kabupaten Jembrana	20,81	BURUK
320	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pesisir Selatan	20,81	BURUK
321	BENGKULU	Kabupaten Kepahiang	20,48	BURUK
322	JAMBI	Kabupaten Tebo	20,48	BURUK
323	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Tengah	20,33	BURUK
324	LAMPUNG	Kabupaten Mesuji	20,33	BURUK
325	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Tengah	20,24	BURUK
326	SUMATERA UTARA	Kabupaten Langkat	20,21	BURUK
327	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu	20,10	BURUK
328	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Utara	20,10	BURUK
329	LAMPUNG	Kabupaten Tulang Bawang	20,10	BURUK
330	SULAWESI UTARA	Kota Manado	20,10	BURUK
331	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Buol	20,00	BURUK
332	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Karimun	20,00	BURUK
333	PAPUA	Kota Jayapura	20,00	BURUK
334	ACEH	Kota Langsa	20,00	BURUK
335	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Katingan	19,98	BURUK
336	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	19,86	BURUK
337	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	19,86	BURUK
338	SUMATERA UTARA	Kabupaten Padang Lawas Utara	19,86	BURUK
339	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai	19,81	BURUK
340	SUMATERA UTARA	Kota Pematangsiantar	19,74	BURUK
341	MALUKU	Kabupaten Kepulauan Aru	19,62	BURUK
342	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Selatan	19,62	BURUK
343	SUMATERA UTARA	Kabupaten Humbang Hasundutan	19,40	BURUK
344	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kapuas Hulu	19,38	BURUK
345	MALUKU	Kota Ambon	19,38	BURUK
346	PAPUA BARAT	Kab Teluk Bintuni	19,38	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
347	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bantaeng	19,33	BURUK
348	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	19,29	BURUK
349	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	19,14	BURUK
350	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Tolitoli	19,00	BURUK
351	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	18,90	BURUK
352	BANTEN	Kabupaten Pandeglang	18,90	BURUK
353	RIAU	Kabupaten Kuantan Singingi	18,76	BURUK
354	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	18,66	BURUK
355	SUMATERA UTARA	Kabupaten Samosir	18,42	BURUK
356	MALUKU	Kabupaten Maluku Barat Daya	18,42	BURUK
357	MALUKU	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	18,42	BURUK
358	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Bulungan	18,18	BURUK
359	BENGKULU	Kabupaten Seluma	18,18	BURUK
360	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Seruyan	18,18	BURUK
361	BALI	Kabupaten Tabanan	18,18	BURUK
362	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Gowa	18,18	BURUK
363	ACEH	Kabupaten Aceh Barat	18,00	BURUK
364	PAPUA	Kabupaten Keerom	18,00	BURUK
365	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Tana Toraja	17,94	BURUK
366	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Barat	17,94	BURUK
367	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Sangihe	17,94	BURUK
368	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Selatan	17,94	BURUK
369	RIAU	Kabupaten Indragiri Hilir	17,62	BURUK
370	SUMATERA UTARA	Kota Padangsidempuan	17,46	BURUK
371	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Tengah	17,46	BURUK
372	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	17,22	BURUK
373	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kapuas	17,11	BURUK
374	PAPUA	Kabupaten Nabire	17,00	BURUK
375	PAPUA BARAT	Kab Teluk Wondama	16,99	BURUK
376	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Gunung Mas	16,87	BURUK
377	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Tanah Tidung	16,75	BURUK
378	SULAWESI BARAT	Kabupaten Polewali Mandar	16,71	BURUK
379	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka Timur	16,71	BURUK/Tidak Dinilai
380	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju	16,47	BURUK
381	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Empat Lawang	16,27	BURUK
382	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Utara	16,27	BURUK
383	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Morowali Utara	16,07	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
384	ACEH	Kabupaten Aceh Singkil	16,03	BURUK
385	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa	16,03	BURUK
386	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Morowali	16,00	BURUK
387	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Muna	15,99	BURUK
388	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Talaud	15,79	BURUK
389	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Jeneponto	15,79	BURUK
390	MALUKU	Kabupaten Buru Selatan	15,79	BURUK
391	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias	15,31	BURUK
392	SULAWESI TENGGARA	Kota Bau-Bau	15,27	BURUK
393	SUMATERA UTARA	Kabupaten Toba Samosir	15,19	BURUK
394	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Selatan	15,04	BURUK
395	PAPUA	Kabupaten Dogiyai	15,00	BURUK
396	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	14,59	BURUK
397	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Toraja Utara	14,59	BURUK
398	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	14,35	BURUK
399	PAPUA	Kabupaten Timika	14,11	BURUK
400	SULAWESI SELATAN	Kota Parepare	14,05	BURUK
401	GORONTALO	Kabupaten Pohuwato	14,05	BURUK
402	ACEH	Kabupaten Pidie	14,00	BURUK
403	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Sigi	14,00	BURUK
404	PAPUA	Kabupaten Jayawijaya	14,00	BURUK
405	MALUKU UTARA	Kabupaten Kepulauan Sula	13,88	BURUK
406	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Lembata	13,60	BURUK
407	ACEH	Kabupaten Bener Meriah	13,10	BURUK
408	PAPUA	Kabupaten Merauke	13,00	BURUK
409	ACEH	Kabupaten Aceh Selatan	13,00	BURUK
410	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Poso	13,00	BURUK
411	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Tengah	12,92	BURUK
412	RIAU	Kabupaten Rokan Hilir	12,38	BURUK
413	SUMATERA UTARA	Kabupaten Pakpak Bharat	12,20	BURUK
414	PAPUA	Kabupaten Jayapura	12,00	BURUK
415	PAPUA	Kabupaten Biak Numfor	12,00	BURUK
416	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Mahakam Ulu	11,96	BURUK
417	SULAWESI UTARA	Kota Kotamobagu	11,96	BURUK
418	PAPUA BARAT	Kab Fakfak	11,72	BURUK
419	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Tengah	11,69	BURUK
420	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Selatan	11,48	BURUK
421	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Selatan	11,46	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
422	ACEH	Kabupaten Aceh Utara	11,00	BURUK
423	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai	11,00	BURUK
424	ACEH	Kota Aceh Barat Daya	11,00	BURUK
425	PAPUA	Kabupaten Sarmi	11,00	BURUK
426	ACEH	Kabupaten Aceh Tamiang	11,00	BURUK
427	PAPUA	Kabupaten Yalimo	11,00	BURUK
428	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Barat Daya	10,98	BURUK
429	GORONTALO	Kabupaten Gorontalo	10,74	BURUK
430	GORONTALO	Kabupaten Gorontalo Utara	10,74	BURUK
431	GORONTALO	Kota Gorontalo	10,69	BURUK
432	MALUKU	Kabupaten Maluku Tengah	10,29	BURUK
433	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe	10,02	BURUK
434	ACEH	Kota Lhokseumawe	10,00	BURUK
435	ACEH	Kabupaten Aceh Jaya	10,00	BURUK
436	ACEH	Kabupaten Bireun	10,00	BURUK
437	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Anambas	10,00	BURUK
438	ACEH	Kota Sabang	10,00	BURUK
439	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamasa	9,79	BURUK
440	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Muna Barat	9,79	BURUK
441	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju Tengah	9,55	BURUK
442	SUMATERA BARAT	Kota Pariaman	9,33	BURUK
443	BALI	Kabupaten Klungkung	9,09	BURUK
444	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Laut	9,00	BURUK
445	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	8,85	BURUK
446	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton	8,83	BURUK
447	MALUKU	Kota Tual	8,61	BURUK
448	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Bima	8,61	BURUK
449	SUMATERA UTARA	Kota Gunungsitoli	8,49	BURUK
450	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	8,37	BURUK
451	PAPUA BARAT	Kab Manokwari	8,37	BURUK
452	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sikka	8,35	BURUK
453	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju Utara	8,35	BURUK
454	BENGKULU	Kabupaten Mukomuko	8,23	BURUK
455	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow	8,13	BURUK
456	JAWA BARAT	Kabupaten Pangandaran	7,89	BURUK
457	MALUKU	Kabupaten Maluku Tenggara	7,66	BURUK
458	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Lamandau	7,54	BURUK
459	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Barat	7,42	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
460	GORONTALO	Kabupaten Bone Bolango	7,36	BURUK
461	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Wakatobi	7,16	BURUK
462	ACEH	Kabupaten Aceh Tenggara	7,00	BURUK
463	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Utara	6,92	BURUK
464	PAPUA	Kabupaten Mamberamo Tengah	6,00	BURUK
465	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Utara	5,74	BURUK
466	PAPUA BARAT	Kab Raja Ampat	5,74	BURUK
467	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Bombana	5,73	BURUK
468	GORONTALO	Kabupaten Boalemo	5,48	BURUK
469	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Utara	5,02	BURUK
470	ACEH	Kabupaten Simeulue	5,00	BURUK
471	PAPUA	Kabupaten Deiyai	5,00	BURUK
472	PAPUA	Kabupaten Paniai	5,00	BURUK
473	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,78	BURUK
474	MALUKU UTARA	Kabupaten Taliabu	4,55	BURUK
475	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Utara	4,53	BURUK
476	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Kepulauan	4,30	BURUK
477	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Timur	4,07	BURUK
478	ACEH	Kabupaten Pidie Jaya	4,00	BURUK
479	PAPUA	Kabupaten Kep. Yapen	4,00	BURUK
480	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Tengah	3,82	BURUK
481	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai Timur	3,58	BURUK
482	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Barat	3,35	BURUK
483	PAPUA BARAT	Kab Kaimana	2,39	BURUK
484	PAPUA	Kabupaten Waropen	2,00	BURUK
485	PAPUA	Kabupaten Supiori	2,00	BURUK
486	PAPUA	Kabupaten Tolikara	1,00	BURUK
487	PAPUA	Kabupaten Boven Diguel	1,00	BURUK
488	PAPUA	Kabupaten Mappi	1,00	BURUK
489	PAPUA	Kabupaten Yahukimo	1,00	BURUK
490	ACEH	Kota Banda Aceh	0,79	BURUK
491	MALUKU UTARA	Kabupaten Pulau Morotai	0,48	BURUK
492	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Rawas Utara	0,00	BURUK
493	LAMPUNG	Kabupaten Pesisir Barat	0,00	BURUK
494	PAPUA BARAT	Kab Manokwari Selatan	0,00	BURUK
495	PAPUA BARAT	Kab Maybrat	0,00	BURUK
496	PAPUA BARAT	Kab Pegunungan Arfak	0,00	BURUK
497	PAPUA BARAT	Kab Sorong	0,00	BURUK
498	PAPUA BARAT	Kab Sorong Selatan	0,00	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
499	PAPUA BARAT	Kab Tambrauw	0,00	BURUK
500	PAPUA BARAT	Kota Sorong	0,00	BURUK
501	PAPUA	Kabupaten Asmat	0,00	BURUK
502	PAPUA	Kabupaten Intan Jaya	0,00	BURUK
503	PAPUA	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	BURUK
504	PAPUA	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	BURUK
505	PAPUA	Kabupaten Nduga	0,00	BURUK
506	PAPUA	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	BURUK
507	PAPUA	Kabupaten Puncak	0,00	BURUK
508	PAPUA	Kabupaten Puncak Jaya	Tidak dilakukan audit	